



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Engku Puteri No 1 Kantor Walikota Batam Kode Pos 29432
Telepon (0778) 462164, 462217, Faksimile (0778) 461349, 461813
Laman bpkad.batam.go.id Pos-el bpkad@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BATAM

NOMOR: 064 /000.7.2.2/IX/2025

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Batam Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029

KEDUA : Ketentuan terkait Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029:

1. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan target yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam;
2. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
3. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud di atas terlampir pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 18 September 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam



Abd. Malik, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660727 199603 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Batam

Nomor : 064 /000.7.2.2/IX/2025

Tanggal : 18 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transoaran dan Akuntable		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD	1. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Belanja Mandatory : - Pendidikan dari APBD, - Infrastruktur, dan -belanja SPM 3. Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah 4. Penyerapan Anggaran 5. Kondisi Keuangan Daerah (PAD dari APBD) 6. Opini BPK atas LKPD (WTP)	75,78	75,87	75,96	76,05	76,24	IPKD= $\sum (\text{Nilai Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})$ 1. Perencanaan & Penganggaran 15% 2. Alokasi Anggaran 20% 3. Transparansi 15% 4. Penyerapan Anggaran 20% 5. Kondisi Keuangan 15% 6. Opini BPK 15%	Laporan dari Aplikasi IPKD dari kemendagri
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keselarasan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Keselaran Program APBD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Progran APBD dengan Jumlah Program RKPD x 100	Aplikasi SIPD RKPD dan Aplikasi SIPD Penganggaran
		Persentase Realisasi Belanja Daerah	Persentase Realisasi Belanja=(Anggaran Belanja a Realisasi Belanja)×100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah dokumen SPD, SP2D (UP/GU/TU/LS-BJ dan LS-GT)	Data Aplikasi SIPD Penatausahaan.
		Persentase laporan OPD sesuai Standar akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan dihitung pada tahun ke N	100%	100%	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD tepat waktu sesuai dengan SAP}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam}} \times 100$	Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Formulasi Perhitungan	Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya tata Kelola Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Penilaian IPA Kategori Baik dengan Rumus = Nilai 2 < IPA ≤ 3	2.01	2.01	2.02	2.03	2.04	Konversi IPA ke Dalam Indeks	SIPD, SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) atau aplikasi pengelolaan aset lainnya
									IPA	
									3 < IPA ≤ 4	
									2 < IPA ≤ 3	
									1 < IPA ≤ 2	
									IPA ≤ 1	
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik BPKAD Kota Batam yang diperoleh dari survei layanan Website BPKAD dengan menggunakan data kuantitatif.	90,97	91,00	91,03	91,06	91,09	Jumlah nilai kuesioner dibagi jumlah responden dibagi jumlah unsur pertanyaan pada kuesioner dikali 25	Kuesioner survei kepuasan masyarakat

Batam, 18 September 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam



Abd. Malik, SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660727 199603 1 003